ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PASA'BU KECAMATAN TAPALANG BARAT KABUPATEN MAMUJU (PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA PASA'BU)

SKRIPSI

MUH HAKIM N

105720564915

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PASA'BU KECAMATAN TAPALANG BARAT KABUPATEN MAMUJU (PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA PASA'BU)

SKRIPSI

Oleh

MUH HAKIM N

NIM 105720564915

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022

17/09/2022
1 eks
Smb. Alumni
B/0597/MAN/2022
HAK
a/

MOTTO

Hidup Yang Tak Direnungi adalah Hidup Yang Tak Layak Untuk Dijalani.

(MUH HAKIM N)

PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT atas ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik, alhamdulillah rabbil'alamin.

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua, saudara, keluarga dan juga almamater biru tercinta

PESAN DAN KESAN

"Teruslah berkarya dan jangan berhenti"

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 GedungIqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecammatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu)

Nama Mahasiswa : Muh. Hakim N
No. Stambuk/NIM : 105720564915
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji Skripsi Strata (S1) pada tanggal 6 Juli 2022 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,12 Dzulidah 1443H
11 Juli 2022M

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Muhiddin Daweng,MM	**Sri Andayaningsih,SE.,MM**
NIDN: 8816401019	**NIDN: 0929037901**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua Program Studi Manajemen
Dr. H. Andi Jam'an,S.E.,M.Si	**Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M**
NBM : 651 507	**NBM : 1085576**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Muh. Hakim N, Nim : 105720564915 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0017/SK-Y/61201/091004/2022, Tanggal 6 Dzulidah 1443 H/ 6 Juli 2022 M. Sebagai Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Dzulhijjah 1443 H
6 Juli 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc (.....)
   (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Achmad AC, ST, M.M (.....)
   2. Muh. Nur R S.E.,MM (.....)
   3. Sri Andayaningsih, S.E., MM (.....)
   4. Nasrullah, S.E., M.M. (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an.,S.E.,M.Si
NBM : 651 507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Hakim N
Stambuk : 105720564915
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 6 Dzulhijjah 1443 H
6 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,

Muh. Hakim N
Nim : 105720536215

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua Program Studi
Dr. H. Andi Jam'an,S.E.,M.Si	**Muh. Nur R, S.E.,M.M**
NBM : 651 507	**NBM : 108 5576**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

MUH HAKIM N, 2022, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu), Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: pembimbing 1. Muhiddin Daweng dan pembimbing 2. Sri Andayaningsih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu). Sampel ini diambil dari kantor desa Pasa'bu dan juga masyarakat desa, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa Pasa'bu kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (perspektif masyarakat desa Pasa'bu) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan mendapat respon masyarakat terkait pengelolaan yang baik oleh aparatur desa selaku sumberdaya manusia.

Kata kunci: Dana desa, pembangunan desa, masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRACK

MUH HAKIM N, 2022, *Analysis of Village Fund Management on the Development of Pasa'bu Village, West Tapalang District, Mamuju Regency (Pasa'bu Village Community Perspective), Thesis, Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: supervisor 1. Muhiddin Daweng and supervisor 2. Sri Andayaningsih.*

This study aims to analyze the Management of Village Funds on the Development of Pasa'bu Village, West Tapalang District, Mamuju Regency (Pasa'bu Village Community Perspective). This sample was taken from the Pasa'bu village office and also the village community, the type of data used in this study was qualitative data obtained from interviews and documentation, in this study the data sources used in data collection included primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the management of village funds for the development of Pasa'bu village, West Tapalang sub-district, Mamuju district (from the perspective of the Pasa'bu village community) was carried out according to applicable procedures and received community responses regarding good management by village officials as human resources.

Keyword: village fund, village development, community

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat serta salam kepada Rasullullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tak terhingga manakala penulisan skripsi yang berjudul " Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis kepada Bapak Nurdin dan ibu Maria yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus, serta saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moril, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse., M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E, M,SI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur R. S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. Muhiddin Daweng, M.M.. Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
5. Ibu Sri Andayaningsih, S.E., M.M Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
6. Bapak/Ibu Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2015 Yang Selalu Belajar Bersama Yang Tidak Sedikit Bantuannya Dan Dorongan Dalam Aktivitas Studi Penulis
9. Terima Kasih Kepada Kepala Desa Pasa'bu beserta jajaranya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasinya.

10. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua kerabat dan teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat menghargai adanya saran kritik dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan dengan adanya skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya Kepada Almamater Tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar,23 Desember 2021

Penulis

MUH HAKIM N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Teori 11

B. Tinjauan Empiris 21

C. Kerangka Konsep 29

BAB III METODE PENELITIAN **26**

A. Jenis Penelitian 26

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Sumber Data 26
D. Informan Penelitian 27
E. Teknik Pengumpulan Data 27
F. Metode Ananlisis Data 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 31
A. Gambaran umum penelitian 31
B. Hasil penelitian 36
C. Pengeloaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Perspektif Masyarakat Desa) 40
D. Pembahasan 41
BAB V PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 46
LAMPIRAN 48

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Nomor **Judul** **Halaman**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 21

Tabe 4.1 Informan penelitian..... 37

Tabel 5.1 pedoman wawancara..... 49

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor **Judul** **Halaman**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 25

Gambar 3.1 Model interaktif Analisis Data Miles dan Huberman..... 28

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 26

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretariss desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintaha, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pembangunan pedesaan memainkan peran yang sangat penting dalam memperbaiki masalah kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan antara desa dan kota. Saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan. Berkenaan dengan rencana stategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan

pembangunan desa sebagai perhatian yang diutamakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka diperlukan sumber pendapatan dana atau anggaran bagi desa.

Pemerintah selalu memberikan upaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa secara otonom dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang didapat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Alokasi dana desa yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil,modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap sebagai hal penting. Pembangunan desa agar dapat tercapai atau terwujud diperlukan suatu kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, serta peran masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak, maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut khususnya pembangunan dalam desa,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pemerintah diharapkan untuk terus berusaha melaksanakan program pembangunan secara efektif melalui manajemen pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

Kegiatan pembangunan ekonomi diartikan sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat seutuhnya dalam meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Berdasarkan pendekatan pembangunan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka diharuskan adanya keseimbangan kewajiban antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan serta fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotongroyong di setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah berhak menjalakan otonomi seluas-luasnya. Otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memperhatikan khususan dan keragaman daerah melalui peningkatan daya saing setiap daerah melalui prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan sehingga dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah perlu pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui keuangan daerah. Faktor yang penting dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah ialah kemampuan keuangan daerah itu sendiri, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah yang merupakan suatu tolak ukur

untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksakan keuangan daerah diperlukan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mampu dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana desa adalah bagian dari pendapatan daerah. Dana desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, berkenaan dengan itu pemerintah daerah juga harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing-masing, terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraannya.

Sehubungan dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa, maka diharapkan proses pembangunan daerah dapat meningkat secara Bersama, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah diharapkan dapat berkurang. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifit dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal utama yang harus selalu diperhatikan. Prinsip pemerataan alokasi dana dalam sistem pemerintah otonomi di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan sistem transfer pendapatan antar pemerintah. Dana desa dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mencapai kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan sumberdaya manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi hak yang diutamakan dalam keberhasilan pembangunan desa. Efektifitas dan efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem alokasi dana desa tujuannya adalah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah dengan adanya partisipasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu di desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahan, sehingga hal ini akan mempengaruhi pengelolaan Dana Desa. Mengenai keterbatasan yang dimaksud, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Kurangnya kelengkapan kebijakan pengaturan mengenai organisasi pemerintah lingkup desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, mengakibatkan kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah yang sangat terbatas.

Salah satu unsur yang memegang peran penting dalam suatu organisasi adalah Manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu manusia (pegawai), harus dikelola secara baik. Nawawi (1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintah desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintah desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal dipedesaan. Desa sebagai unit pemerintah terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam lingkup pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran aparat desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan tuntutan terwujudnya aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan (kompetensi) dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan profesional diperlukan pola pendidikan dan pelatihan yang mampu mendorong terciptanya kualitas pengetahuan, sikap mental dan moral serta perilaku aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan misi pemerintah daerah.

Pemberdayaan sumberdaya merupakan hal penting yang saling berkaitan dan mempunyai pengaruh besar terhadap aparat. Bila disatukan pemberdayaam sumber daya dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk lebih memberdayakan daya manusia itu sendiri yaitu aparatur melalui pengembangan berupa mengembangkan kemampuan dan hal-hal lainnya untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam bidang-

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

bidang tertentu atau bahkan dalam melaksanakan tugas berdasarkan poksi kerja. Pemberdayaan aparatur tidak dapat terlepas dari kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Upaya pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya aparat merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian demi tercapainya tujuan organisasi untuk mendapatkan aparatur yang berkualitas dan dapat menciptakan kemandirian dan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki.

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat sumber daya agar para aparat kian aktif menyumbangkan ide-ide yang membangun dan mampu menjadikan desa kian maju sehingga harus dilakukan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas disini adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu bahkan kelembagaan. Melalui pemberdayaan ini diharapkan segenap aparat sebagai perencana dan pelaksana dari berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan dimasa yang akan datang telebih dalam pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang ada di pedesaan sehingga masyarakat bisa puas dengan pelayanan dari pihak pemerintah.

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dan yang paling menentukan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang siap pakai dan memiliki kemampuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkatkan kualitas, kesetian serta

tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan bagi para pegawai dalam struktur organisasi. Dalam hal ini, pemimpin memegang peran untuk memberdayakan para pegawainya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia lebih bertangung jawab terhadap pekerjaan mereka yang nantinya dapat meningkatkan kinerja mereka. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, kedalam posisi yang memberi kesempatan untuk lebih bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis akan mengemukakan permasalahan yaitu bagaimana Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (perspektif masyarakat Desa Pasa'bu)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (perspektif masyarakat Desa Pasa'bu).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsi pemikiran bagi semua pihak khususnya perangkat desa untuk menjalankan program yang telah direncanakan dengan pengelolaan dana desa yang baik dan benar, dan juga sebagai media implementasi teori bagi penulis dalam memperluas khazanah keilmuan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dalam gpenelitian ini, diantaranya:

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa terkhusus desa Pasa'bu dalam menjalankan aktifitas pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip yang baik dan benar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah bahan referensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus dibidang sumber daya manusia (SDM).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Manajemen

Manajemen mulai timbul di era revolusi industry sekitar abad 20 di mana berbagai negara di Eropa dan Amerika mengalami perubahan-perubahan dalam pengelolaan industry yang dituntut semakin efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, semakin maju dan juga semakin kompleks.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

Malayu S.P Hasibuan (2012:1), mendefenisikan manajemen sebagai suatu ilmu atau seni yang mengatur bagaimana proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Handoko, T. Hani (2014), defenisi manajemen yaitu bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan dalam sebuah organisasi dengan mengacu pada fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leadership) dan pengawasan (controlling).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai defenisi manajemen, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, berupa *Planning, Organizing, Staffing, Directing,* dan *Controlling* yang dilakukan oleh para anggota organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok kerja. Manajemen SDM juga menyangkut desain pekerjaan, perencanaan pegawai, seleksi dan penempatan, pengembangan pegawai, pengelolaan karir, kompensasi, evaluasi kinerja pengembangan tim kerja sampai dengan masa kerja selesai.

Tjokrowinoto Moelianto. (2012:30) menjelaskan bahwa Sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi sentral untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang menempatkan manusia dengan fungsi sebagai *resource* pembangunan. Dalam hal ini harga dan nilai manusia ditentukan oleh relevansi kontruksinya pada proses produk. Kualitas manusia dibentuk sedemikian agar dapat sejalan dengan tuntutan pembangunan atau tuntutan masyarakat.

Malayu S.P. Hasibuan (2019:11) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Menurut Bohlander dan snell (2010) Sumber daya manusia ialah ilmu yang mempelajari bagaimana pemberdayaan karyawan dalam perusahaan, pembuatan pekerjaan, pengelompokkan kerja, pengembangan kemampuan karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja, atau dapat diartikan sebagai sebuah proses pengelolaan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai sumber daya manusia yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber daya atau aset yang paling utama, melalui penerapan fungsi manajemen maupun fungsi operasional sehingga tujuan organisasi yang sudah ditetapkan mampu tercapai dengan baik.

3. Pengertian Dana Desa

Sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Dana desa berasal dari dana yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

a. Alokasi Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013). Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah kabupaten/kota, setelah dikurangi dengan alokasi khusus yang dialokasikan untuk masing-masing desa secara proporsional paling sedikit 10%. Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan oleh daerah dan ditransfer ke rekening desa juga diatur dalam (PP No. 72 Tahun 2005).

Ketentuan PP tentang ADD dalam Permendagri No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengatur lebih tentang aturan pengelolaan keuangan desa. Permendagri menjelaskan tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran desa, mekanisme alokasi, penggunaan dana dan sistem pertanggungjawabannya. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah :

1) Tujuan ADD untuk peningkatan sektor pembangunan prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidup.
2) Asas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, serta partisipatif.

3) ADD merupakan bagian yang integral dari APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan.

4) Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

5) Perlu melaporkan secara berkala (bulanan) setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran ADD dan melaporkan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan tersebut bersifat independen dari sistem pertanggungjawaban APBD dan berfungsi sebagai bahan kontrol dan monitoring serta evaluasi.

6) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, telah dibentuk Pokja Pembina Kabupaten/Kota dan Pokja Pendamping Kabupaten untuk melaksanakan kewajiban sesuai jenjang dan kewenangannya. Dana tim terkait dianggarkan dalam APBDes dan diluar untuk ADD.

b. Tujuan alokasi dana desa

Tujuan alokasi dena desa adalah sebagai berikut:

1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan Pemberdayaan masyarakat.

3) Memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan.

4) Meningkatkan pelayanan publik di desa

5) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Pengelolaan Dana Desa

Asas-Asas Pengelolaan Anggaran Desa adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Prinsip keterbukaan atau transparan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang anggaran Desa.
2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3) Partisipatif, yaitu mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang ada
4) Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan anggaran dana desa harus mengacu pada aturan serta pedoman yang ada.

4. Pembangunan Desa

Ketentuan Umum UU Desa memberikan defenisi Pembangunan Desa sebagai usaha peningkatan kualitas hidup yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa tertuang dalam pasal 78 ayat (1), yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara dinamis. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, hal yang paling penting adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam rangka mewujudkan arus utama perdamaian dan keadilan soial seperti yang tertuang dalam pasal 78 ayat (3).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka UU Desa, pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan pembangunan desa berdasar pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam perencanaan yaitu dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut telah diatur dalam UU Desa pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan berdasar kepada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.
2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
   a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
   b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencan Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

a. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
b. Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan yang dasar.
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentrama

b. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 dijelaskan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) 70% dari jumlah anggaran belanja Desa minimal digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2) 30% dari jumlah anggaran belanja Desa maksimal digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasinal BPD, dan Insentif RT dan RW.

c. Pertanggungjawaban

Ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, juga diatur standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Arah pemeberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam anggaran Dana Desa sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundangundangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina,Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertamatama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41)

5. Perspektif Masyarakat

Perspektif ialah suatu kumpulan pendapat awal maupun keyakinan terhadap sesuatu yang perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tersendiri, dan cara tersebut berkaitan dengan asumsi awal yang menjadi dasarnya, unsur-usur pembentuknya, dan ruang lingkup apa yang dipandangnya. Perspektif membimbing setiap orang untuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional, dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks pada situasi tertentu

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *"participation"* yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan.

Beragamnya perspektif, sikap dan perilaku masyarakat terhadap lembaga pemerintahan khususnya yang ada di desa, di antaranya tentang kredibiltas dan integritas sumberdaya manusia yang ada menjadi salahsatu isu yang kerap menimbulkan problematika di dalam masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta profesionalitas sebuah lembaga pemerintahan desa karena tidak sedikit kasus yang ditemukan pada lembaga pemerintahan desa yang berjumlah sangat banyak

ternyata justru bekerja secara tidak profesional. Dalam berbagai kasus yang terjadi di masyarakat ialah kurangnya partisipasi dalam memberikan aspirasi, masih adanya masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Sementara itu, masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi berperan sebagai subyek pembangunan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko: 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pembangunan ekonomi suatu daerah, tentu tidak terlepas dari peranan masyarakat yang ada di dalamnya. Pemerintah yang bertindak sebagai pengelola tentunya harus melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar terciptanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

B. Tinjauan Empiris

Pada bagian ini, penulis telah memilih beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan referensi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai manajemen dana desa terhadap pembangunan desa dalam perspektif masyarakat, penulis mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dirangkum dalam table dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	Umi Zahrotul Ula, (2020)	Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018	Deskriktif Kualitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa program/kegiatan yang ditetapkan dalam musrembangdes belum bersinergi dengan visi desa serta program jangka panjang kepala desa Tamansari yang ingin menciptakan masyarakat desa yang berdaya untuk merealisasikan desa wisata Tamansari. Hal ini dapat dilihat pada konsentrasi ADD yang mayoritas ditujukan untuk bidang

				penyelenggaraan pemerintahan.
2	Milatusholihah Ana (2019)	Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Deskriktif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip good corporate governance pada Desa Kebowan telah berlangsung dengan baik namun masih terdapat banyak kelemahan. Penerapan prinsip good corporate governance belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi antar perangkat desa dan kurangnya pendidikan dari aparatur desa sehingga dalam menyelesaikan tugas dari masing-masing aparat desa menjadi kurang maksimum.
3	M.Rinaldi Aulia (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung	Analisis data Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan laporan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015).		pertangungjawabannya
4	I Made Sara, (2021)	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa VOL .3 NO. 2, Januari 2021 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205	Kuantitatif	Hasil penelitian menunujkkan bahwa kualitas sumber daya manusia di desa atau perangkat desa dan komitmen pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal tersebut menyatakan bahwa kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan ataupun akuntabilitas dana desa. selanjutnya dalam hal komitmen pemerintah daerah memberikan bukti hubungannya yang signifikan terhdap keberhasilan pengelolaan dana desa. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan di desa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

				memang tidak terlihat signifikan. Akan tetapi dalam hal pembinaan dan pengawasan, pemda memiliki peran yang strategis
5	Cindy Azizah, (2020)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)	Kualitatif	Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar daripada tiga bidang lainnya. Bidang pembangunan desa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

				lebih besar anggaran maupun persentasenya dibanding dengan bidang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, Sugiyono (2016). kerangka pikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawaah ini.

Gambar 2.1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata – kata tertulis uraian yang diperoleh dari informan dan perilaku subjek yang diamati.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 - Januari 2022

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 2 yaitu:

1. Data Primer

   Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti pada variabel yang digunakan untuk penelitian tertentu, beberapa contoh sumber data primer adalah individu, fokus, group, diskusi panel dari responden yang secara khusus dibentuk oleh peneliti untuk memperoleh pendapat mengenai isu-isu spesifik yang dicari.

2. Data sekunder

   Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data juga dapat diperoleh dari sumber sekunder misalnya catatan instansi, atau arsip, publikasi pemerintah analisis yang ditawarkan oleh media, situs web internet dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi-informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaanya yang diteliti, menjadi informan dalam penelitian ini.

1. Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memahami permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Informan non kunci adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang akan diteliti adapula yang dimaksud adalah 2 (dua) orang jadi jumlah keseluruhan informan adalah 5 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

   Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

2. Wawancara

   Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) kepada responden. Dalam kegiatan wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan respoden terkait hal yang akan dibahas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat digunakan sebagai bahan untuk memeriksa keabsahan data. Dokumentasi dilakukakn dengan cara mencari data mengenai hal – hal berupa catatan dokumentasi dengan memberikan gambaran berupa foto atau video.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, dalam (Emzir, 2014) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

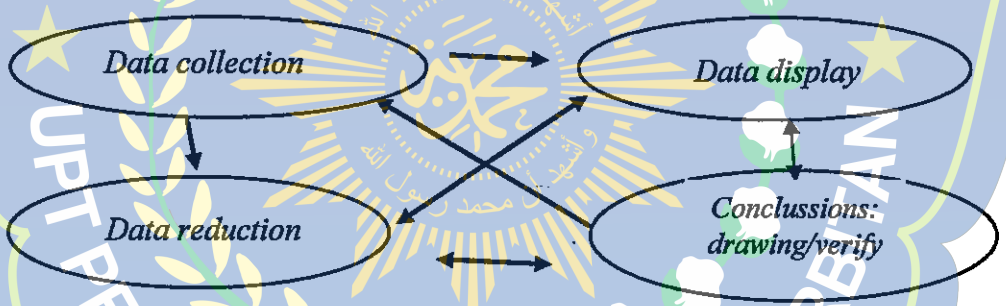

Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan kesemuanya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang terdapat di lapangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Menurut Sugiyono (2012). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan memisahkan hal yang tidak perlu dengan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks dan narasi. Pada bagian ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conchlutation drawing verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345), yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian akan ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal bersifat khusus

untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali hasil reduksi dan *display* data, sehingga kesimpulan yang diambil relevan dengan permasalahan penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat

Desa Pasa'bu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, terdiri dari 6 dusun yakni dusun Pasa'bu, dusun Labuang, dusun Beru-beru, dusun Sarana, dusun Le'be, dan dusun Ujung Bundu. Desa Pasa'bu merupakan pemekaran dari desa Dungkait dan merupakan pusat perekonomian di kecamatan Tapalang Barat. Akses menuju Kantor kecamatan dari desa sekitar 5 Kilometer dan sekitar 32 Kilometer dari Ibukota Provinsi. Peningkatan IPTEK di segala aspek Perekonomian, Kebudayaan dan Pendidikan menjadi salah satu visi dan misi yang harus dicapai sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang cukup, SDM yang handal yang akan memaksimalkan potensi yang ada agar tercipta masyarakat yang siap dalam menghadapi era globalisasi di kemudian hari.

Menurut Bukti – Bukti dan kesaksian para Tokoh Masyarakat Desa Pasa'ba bahwa Sejarah terbentuknya sebuah Wilayah menjadi suatu Desa terjadi beberapa Fase diantaranya sebagai berikut :

Pasa'bu adalah bekas tanah jajahan peninggalan Belanda yang disebut tanah Wilayah kekuasaan Netherland, Pasa'bu adalah salah satu dusun di Desa Dungakit yang Setelah ditinjau dari study Kelayakan, Dusun Pasa'bu Bisa menjadi desa pada kecamatan tapalang barat.

Pada tahun 1995 Pasa'bu resmi dinyatakan sebagai desa otonom dan lepas dari bagian wilayah desa Dungkait yang di pimpin oleh A. Anmar selaku pejabat sementara di Desa Pasa'bu yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pasa'bu Barat, Pasa'bu Timur, Tanete Pao dan Ahu.

Pada tahun 1997 diadakan pemilihan kepala Desa Secara Demokrasi maka terpilihlah M. As'ad Sul, BA sebagai Kepala Desa Pasa'bu yang membawahi 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pasa'bu Barat, Pasa'bu Timur, Tanete Pao dan Dusun Ahu

Pada tahun 2007 Pemiihan Kepala Desa Pasa'bu yang ke 2 dilaksanakan secara Demokratis maka terpilihlah Djalaluddin jadil, S. Ag, dibawah kepemimpinanya terjadi pemekatan Dusun Ahu Menjadi Desa Ahu. Dan pada saat itu juga pemekaran dusun labuang menjadi 2 (dua) Dusun Yaitu Dusun Labuang dan dusun Sarana, jadi Jumlah Keseluruhan Dusun Di Desa Pasa'bu menjadi 6 Dusun yaitu Dusun Sarana, Dusun labuang, Dusun Pasa'bu, Dusun Beru-beru, Dusun Le'be dan Dusun Ujungbundu.

Pada Tahun 2013 Djalaluddin Jadil S. Ag mengundurkan Diri dari Kepala desa dan di ganti Oleh Asrul Ahmad Sebagai Pejabat sementara.Pada tahun 2013 Asrul Ahmad Selaku Pejabar Sementara Desa Pasa'bu sampai tahun 2014 yang digantikan oleh Kamal Usman, S. Pd. Pada tahun 2015 Pemilihan Kepala Desa Pasa'bu yang ke 3 (Tiga) dilaksanakan secara demokratis maka terpilihlah Jasri Kasim Sebagai Kepala Desa Pasa'bu yang membawahi 6 (Enam) Dusun sampai Sekarang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. **Struktur organisasi**

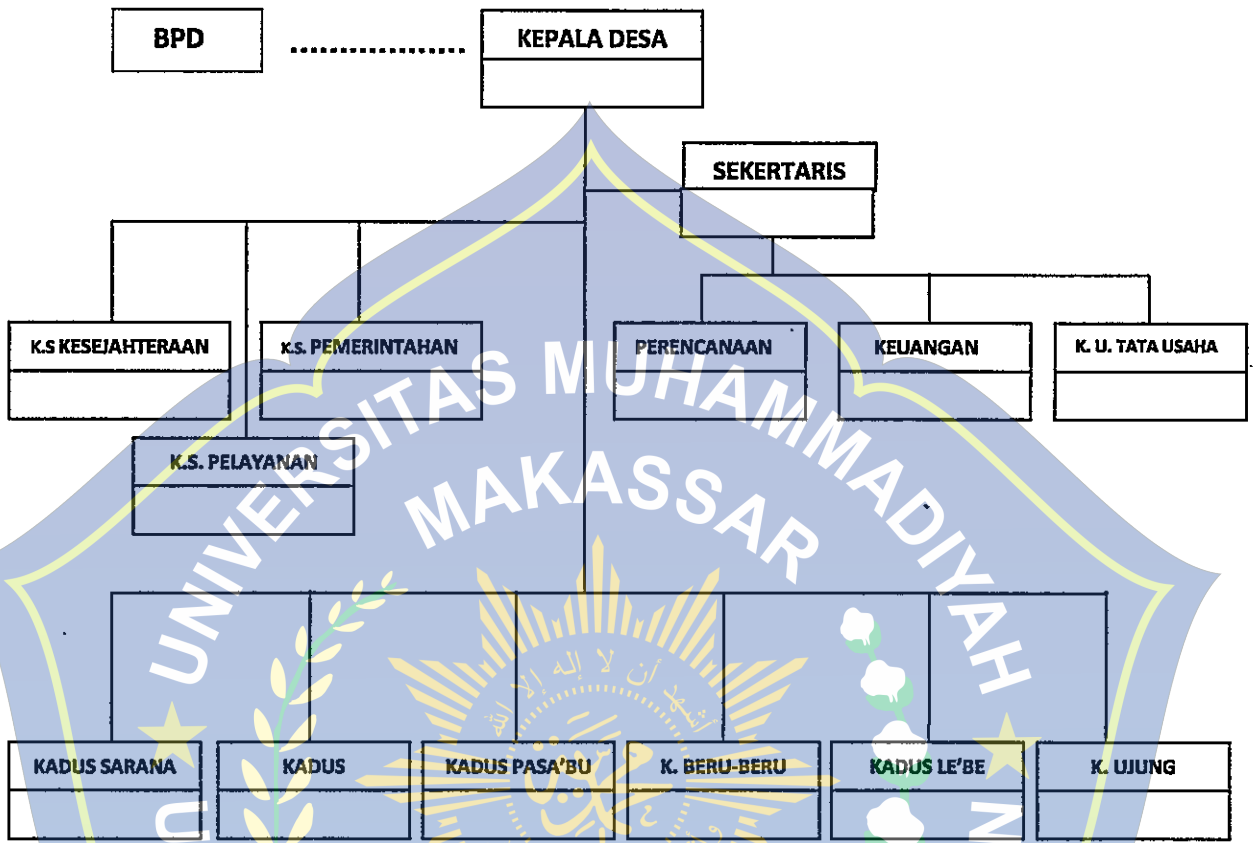

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Job Description

Adapun tugas struktur organisasi masing - masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Sekretaris

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Melaksanakan urusan ketatausahaan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

urusan umum, urusan keuangan, dan melaksanakan perencanaan yang berkaitan dengan persoalan administrasi.

3. **Kepala Urusan Tata Usaha**

   Kepala urusan Tata Usahan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:

   a. Fungsi administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Dan penataan administrasi perangkat desa.
   b. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
   c. Penyiapan rapat
   d. Pengadministrasian aset
   e. Inventarisasi
   f. Perjalanan dinas dan pelayanan umum
   g. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris desa atau kepala desa

4. **Kepala Urusan Keuangan**

   Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan keuangan seperti:

   a. Pengurusan administrasi keuangan
   b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
   c. Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. **Kepala Urusan Perencanaan**

   Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi pengoordinasian urusan perencanaan seperti:

   a. Menyusun rencana APBDesa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan

c. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

6. Kepala Urusan Pemerintahan

a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan

b. Penyusunan rancangan regulasi desa

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa

d. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan kepala desa

7. Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional sebagaimana tugas yang akan diberikan kepala desa

8. Kepala Urusan Pelayanan

a. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan social dan lainnya.

d. Pelayanan kepada masyarakat

e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan kepala desa

9. Kepala Dusun

a. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

b. Kepala dusun memiliki tugas menjalankan kegiatan kepala desa di wilayahnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Pelaksana fungsi lain yang diberikan kepala desa.

b. Visi Dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pemerintahan desa yang profesional menuju sejahtera, tertata, dan bertaqwa.

2. Misi

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan transparan
b. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa sebagai pelayan masyarakat
c. Mengoptimalkan swadaya masyarakat dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan
d. Penataan lingkungan dengan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang
e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya dan bertaqwa.

B. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan: Analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (perspektif masyarakat desa Pasa'bu). Pada penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari lokasi penelitian.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan informan penelitian. Dimana data primer adalah data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang diteliti (sampel atau responden) data sekunder adalah data yang sumbernya dari informasi

media yang dimiliki relevan dengan masalah penelitian dan layak dijadikan suatu referensi, dokumen internal dalam melakukan penelitian.

1. Identitas informan

Identitas informan adalah identitas diri dari informan yang akan diwawancarai.

Tabel 4.1 Informan penelitian

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Muh. Pipin., ST	L	Sekretaris Desa	S1
2	Hasrillah., S.Ip	L	Kaur Keuangan	S1
3	Fahrisal., S.Ip	L	Kaur Perencanaan	S1
4	Rustam., A.Ma.Pd	L	Kadus Beru-beru	D3
5	M. As'ad Tahir., S.Pd	L	Kadus Pasa'bu	S1

Sumber data primer wawancara (2021)

Data diatas menjelasakan mengenai identitas atau sumber informasi dalam penelitian ini.

2. Deskripsi hasil penelitian (wawancara)

Berikut hasil wawancara dalam hal pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang barat Kabupaten Mamuju yaitu:

Peneliti:

Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Pasa'bu dalam menerapkan prinsip pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi terhadap pembangunan desa?

Selanjutnya bapak Muh. Pipin menjawab:

"Kami selaku aparatur desa melakukan apapun itu ada pedomannya, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Peraturan yang menjadi prioritas itu khususnya dalam Perbup Kab. Mamuju baik dari peraturan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
MILIK PERPUSTAKAAN UNISMUH MAKASSAR

prioritas penggunaan anggaran untuk apa dll itu yang menjadi acuan kami. Jadi prinsip pengelolaan kami sesuai dengan aturan atau regulasi yang melandasinya". (wawancara, 26 Desember 2021)

Peneliti:

Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Pasa'bu terutama dalam pembangunan desa?

Selanjutnya bapak Muh.Pipin menjawab:

"Selalu berpedoman dengan peraturan yang ada. Tidak melenceng dari itu. Jadi kita lakukan secara terstruktur. Pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas mana saja, rencana itu kita ajukan ke camat diteruskan ke bupati setelah dana cair kita lakukan tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan itu ada laporan berkala dari tim pelaksana hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian kepala desa melaporkan spjnya itu".(wawancara,26 Desember 2021)

Peneliti:

Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pasa'bu sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya?

Selanjutnya Pak Hasrillah menjawab:

"Selalu berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada. Baik peraturan dari Kemendagri, Kemenkeu, Perbup. Acuannya itu, Setiap akhir pembangunan/ kegiatan apa saja yang berhubungan dengan uang harus ada notanya. Pada laporan SPJ itu ya didukung adanya lampiran lampiran seperti surat pesanan, nota harus ada yang stempel, materai, komplit pokoknya, gambar, foto. Dalam pelaporan kita juga sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam membuat laporan juga dibimbing dari pihak kecamatan dan sesuai dengan pembukuan model sekarang".(wawancara,26 Desember 2021).

Peneliti:

" Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

Selanjutnya Pak Fahrisal menjawab:

"Selalu diikutsertakan karena sudah ketentuan, Partisipasi masyarakat pun Bisa dikatakan aktif, nanti bisa dicek di daftar hadir saat musrengbangdes bagaimana keterlibatan masyarakat. Dari kecamatan dari inspektorat itu pasti dilakukan rapat evaluasi setiap tahunnya. Jadi pembangunannya bagaimana-bagaimana itu diperiksa. Dalam rapat evaluasi hanya melibatkan pemerintah desa dan tim tim pembangunan

seperti tim LPMD saja. Kalau melibatkan masyarakat itu saat Musrengbangdes dan Musdus saja. (Wawancara,26 Desember 2021)

Peneliti :

Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?

Selanjutnya pak Fahrisal menjawab :

"Kalau dalam pebangunan desa di Pasa'bu sendiri itu justru melibatkan masyarakat sebagai tukang dalam pembangunan di desa. Karena sesuai peraturan bupati yang terbaru sebisa mungkin disaat pembangunan harus menggunakan tenaga lokal maupun bahan baku lokal. Untuk pihak ketiga tidak menggunakan itu. Pihak ketiga jika pembangunan diperkirakan diatas 200juta.(Wawancara,26 Desember 2021).

Peneliti:

Apa tanggapan masyarakat Desa Pasa'bu terkait kinerja aparat desa dalam pengelolaan anggaran terhadap Pembangunan desa?

Selanjutnya Pak Rustam dan Pak As'ad Tahir menjawab:

"Selaku Kepala dusun keduanya mengatakan melihat tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik dan nonfisik di desa tentunya sangat senang apalagi dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal ini akan membantu pemerintah desa melaksanakan perwujudan pembangunan di desa. Ya sebagai masyarakat juga kami sangat senang dengan tata Kelola aparat di desa kami yang mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang bagus di bidang pembangunan desa baik infrastruktur fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya".(Wawancara,26 Desember 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (perspektif masyarakat desa)

Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa tentunya berangkat dari regulasi atau aturan yang melandasinya, dengan pendekatan legalitas berarti setiap gerak pembangunan pedesaan senantiasa tetap berlandaskan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setiap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjutnya dilakukan oleh instansi/dinas dan jabatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, dan sesuai dengan hierarkhi yang ada, namun tetap dalam keterkaitan dan keterpaduan satu sama lainnya. Dengan demikian melalui pendekatan ini berarti bahwa pengelolaan dana desa tidaklah dilaksanakan secara terkotak-kotak, pada bidang atau sektornya masing-masing.

Penyelenggaraan pembangunan pedesaan, dan penetapan kebijaksanaan yang ditempuh selalu memperhatikan berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berbagai hasilnya, serta melihat kepada berbagai potensi, sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah pedesaan yang bersangkutan. Pendekatan yang lebih diutamakan dalam pembangunan di pedesaan adalah pengembangan potensi sumber daya manusia dengan pengembangan potensi sumber daya alam.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan suatu pendekatan atau metode, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamproses pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

desa dimaksudkan untuk membantu dan mengacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan, langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakan dalam suatu kesatuan dengan daerah penyelenggaan pembangunan desa tidak terlepas dari kesadaran setiap penduduk yang tinggal di Desa tersebut, partisipasi dari masyarakat merupakan suatu syarat yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan yang pada hakikatnya pembangunan desa adalah susatu proses modernisasi yang mengantarkan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia ke arah penghidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam mewujudkan pembangunan di desa khususnya pembangunan di desa secara swadaya, partisipasi atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat desa secara swadaya.

B. Pembahasan

Proses pengeloaan dana desa terhadap pembangunan desa pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana pengalokasiannya sesuai dengan peraturan. Yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada setiap kegiatan atau program kerja yang ada di desa.

Manajemen dana desa merupakan suatu proses yang akan membawa desa semakin membaik kedepannya, pengelolaan yang baik oleh aparatur desa tentunya akan memberikan dan menghasilkan perspektif yang baik bagi masyarakatnya. Dana desa yang diterima agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak salah sasaran mulai dari pembentukan tim hingga laporan pertanggung jawaban harus dilaksanakan demi terciptanya desa yang maju dan mandiri. Tentunya tidak lupa dengan prinsip transparansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa harus diperhatikan dengan baik agar masyarakat dapat melihat dan memahami untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Jika kita berbicara keterkaitan bagaimana relevansi antara pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertama, manajemen dana desa yang baik akan menghasilkan pembangunan desa yang baik, sebaliknya jika manajemen atau pengelolaannya buruk maka pembangunannya pun akan mengikuti. Kedua, manajemen dana desa tidak aka nada apabila tidak ada kegiatan yang direncanakan pada desa, maka dari itu pembangunan desa merupakan kegiatan yang dapat menyokong adanya manejemen dana desa. Ketiga, pembangunan desa tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak ada manajemen dana desa yang dikelolanya. Pentingnya perencanaan hingga titik evaluasi merupakan Langkah penting untuk memastikan dana desa yang digunakan tepat pada sasarannya dan masyarakat dapat menggunakannya untuk kesejahteraan dan kehidupannya.

Adapun sasaran dari anggaran Dana Desa adalah untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa juga untuk Pemberdayaan masyarakat Desa dan juga untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Bangka yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/Kota labuhanbatu Utara. Anggaran Dana Desa digunakan untuk meliputi pembangunan jalan Desa, pembangunan parit,beton rehab bangunan kelas dan kantor juga untuk bidang pemberfayaan ekonomi masyarakat.

Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Pasa'bu dari alokasi Dana Desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan dan gedung rehab PAUD, pembuatan parit beton, dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok pemuda, keigiatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.. Setelah itu, adanya program unggulan yang saat ini menjadi prioritas Desa antara lain pemasangan jaringan internet ke masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh M.Rinaldi Aulia (2016) tentang analisis pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa (studi kasus pada kecamatan V Koto Kampung Dalam) Kabupaten PadangPariaman Tahun anggaran 2015). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggung jawabannya .

Kualitas Sumber daya manusia di desa atau perangkat desa dan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan ataupun akuntabilitas dana desa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasaran hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten mamuju (perspektif masyarakat desa Pasa'bu), maka dapat disimpulkan:

Sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur desa dalam hal Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Pasa'bu sudah cukup baik dengan mengikuti regulasi yang berlaku dan sesuai prosedur. Melihat tingkat pasrtisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pembangunan desa serta tanggapan positif dalam hal pengelolaannya.

Proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya sudah cukup efisien dengan melihat kontribusi masyarakat yang efektif serta tujuan dan sasaran mulai dari penggunaan anggaran sampai turunnya dana yang langsung melibatkan pemerintah desa dan masyarakat

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat jangan mempersulit masyarakat ketika ingin mengurus sesuatu dan menyapu bersih oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli).

2. Sebagai Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi, dan peningkatan proram pembangunan yang lebih baik lagi.
3. Dalam tata Kelola pemerintahan di desa, agar memberikan kewenangan terhadap aparat desa sesuai fungsi dan wewenangnya dan kepala desa tidak memberikan intervensi yang berlebih.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

A Sholehah.2020. Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). Google Cendekia (*online*) (http://repository.radenintan.ac.id/)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (*online*). (https://kbbi.kemendikbud.id/, diakses 6 Juni 2021).

Bohlander dan Snell.2010.*Managing Humant Resources. South-Western Cengage Learning.*

Cindy Azizah, 2020. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Lampung. UIN Raden Intan. (*online*). (http://repository.radenintan.ac.id/)

Emzir, 2014. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. PT. Rajagrafindo Persada.Jakarta

Hasibuan, Malayu. 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Askara. Jakarta

Handoko, T. Hani. 2014 Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia BPFE, Yogyakarta.

Kartasasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Mondong, H (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan

Milatusholihah, Ana (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. (online). (http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11053).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

PP No 8 2016 Tentang Dana Desa

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa

Rinaldi Aulia.2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015. (online). (https://etd.unsyiah.ac.id/)

Suryani,Arna.2019.Manajemen Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.348-354 Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2.117 ISSN 2541-6243 (Online).

Sugiyono.2016. Metode penelitian Kuantitatif,kualitatif,R&D. IKAPI.Bandung

Sugiyono. 2012. Memahami penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

Suparno, A.Suhaenah. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional.Jakarta

Sutoro Eko. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2012. Birokrasi dalam Polemik. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Tjokroamidjojo,Bintoro.1988.Teori dan Strategi Pembangunan Nasional.CV. Haji Mas Agung.Jakarta.

Todaro P Michael, Smith C Stphen. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Udik Jatmiko. (2021).Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa. NEM. Kediri

Umi Zahrotul Ula, (2020), Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018. (online). (https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Wasistiono dan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Jatinangor.

L

A

M

P

I

R

A

N

HASIL WAWANCARA 1

Nama Informan : Bapak Muh.Pipin, S.T

Jabatan : Sekertaris Desa

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak Muh. Pipin, S.T

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Pasa'bu dalam menerapkan prinsip pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi terhadap pembangunan desa?
Informan (Muh.Pipin, S.T)	" Kami selaku aparatur desa melakukan apapun itu ada pedomannya, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Peraturan yang menjadi prioritas itu khususnya dalam Perbup Kab. Mamuju baik dari peraturan prioritas penggunaan anggaran untuk apa, dan lain-lain. Itu yang menjadi acuan kami, jadi prinsip pengelolaan kami sesuai dengan aturan atau regulasi yang melandasinya"
Peneliti (Muh Hakim N)	Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Pasa'bu terutama dalam pembangunan desa?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Informan (Muh.Pipin, S.T)	"Selalu berpedoman dengan peraturan yang ada. Tidak melenceng dari itu. Jadi kita lakukan secara terstruktur. Pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas mana saja, rencana itu kita ajukan ke camat diteruskan ke bupati setelah dana cair kita lakukan tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan itu ada laporan berkala dari tim pelaksana hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian kepala desa melaporkan SPJnya itu"

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA 2

Nama Informan : Bapak Hasrillah, S.Ip

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak Hasrilla, S.Ip

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pasa'bu sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya?
Informan (Hasrilla, S.Ip)	"Selalu berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada. Baik peraturan dari Kemendagri, Kemenkeu, Perbup. Acuannya itu, Setiap akhir pembangunan/ kegiatan apa saja yang berhubungan dengan uang harus ada notanya. Pada laporan SPJ itu ya didukung adanya lampiran lampiran seperti surat pesanan, nota harus ada yang stempel, materai, komplit pokoknya, gambar, foto. Dalam pelaporan kita juga sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam membuat laporan juga dibimbing dari pihak kecamatan dan sesuai dengan pembukuan model sekarang".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA 3

Nama Informan : Bapak Fahrisal, S.Ip

Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak Fahrisal,S.Ip

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	"Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?
Informan (Fahrisal, S.Ip)	"Selalu diikutsertakan karena sudah ketentuan, Partisipasi masyarakat pun Bisa dikatakan aktif, nanti bisa dicek di daftar hadir saat musrengbangdes bagaimana keterlibatan masyarakat. Dari kecamatan dari inspektorat itu pasti dilakukan rapat evaluasi setiap tahunnya. Jadi pembangunannya bagaimana-bagaimana itu diperiksa. Dalam rapat evaluasi hanya melibatkan pemerintah desa dan tim tim pembangunan seperti tim LPMD saja. Kalau melibatkan masyarakat itu saat Musrengbangdes dan Musdus saja".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Peneliti (Muh Hakim N)	Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?
Informan (Fahrisal, S.Ip)	"Kalau dalam pebangunan desa di Pasa'bu sendiri itu justru melibatkan masyarakat sebagai tukang dalam pembangunan di desa. Karena sesuai peraturan bupati yang terbaru sebisa mungkin disaat pembangunan harus menggunakan tenaga lokal maupun bahan baku lokal. Untuk pihak ketiga tidak menggunakan itu. Pihak ketiga jika pembangunan diperkirakan diatas 200juta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA 4

Nama Informan : Bapak Rustam, A.Ma.Pd

Jabatan : Kepala Dusun Beru-beru

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak Rustam

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	Apa tanggapan masyarakat Desa Pasa'bu terkait kinerja aparat desa dalam pengelolaan anggaran terhadap Pembangunan desa?
Informan (Rustam, A.Ma.Pd)	"Selaku Kepala dusun mengatakan melihat tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik dan nonfisik di desa tentunya sangat senang apalagi dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal ini akan membantu pemerintah desa melaksanakan perwujudan pembangunan di desa. Ya sebagai masyarakat juga kami sangat senang dengan tata Kelola aparat di desa kami yang mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang bagus di bidang pembangunan desa baik infrastruktur fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA 5

Nama Informan : Bapak M. As'ad Tahir, S.Ag

Jabatan : Kepala Dusun Pasa'bu

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak M.As'ad Tahir

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	Apa tanggapan masyarakat Desa Pasa'bu terkait kinerja aparat desa dalam pengelolaan anggaran terhadap Pembangunan desa?
Informan (Rustam, A.Ma.Pd)	"Selaku Kepala dusun mengatakan melihat tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik dan nonfisik di desa tentunya sangat senang apalagi dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal ini akan membantu pemerintah desa melaksanakan perwujudan pembangunan di desa. Ya sebagai masyarakat juga kami sangat senang dengan tata Kelola aparat di desa kami yang *mampu memberikan* pelayanan dan kinerja yang bagus di bidang pembangunan desa baik infrastruktur fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HASIL WAWANCARA 5

Nama Informan : Bapak M. As'ad Tahir, S.Ag

Jabatan : Kepala Dusun Pasa'bu

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Desember 2021

Tempat Wawancara : Rumah kediaman Bapak M.As'ad Tahir

	MATERI WAWANCARA
Peneliti (Muh Hakim N)	Apa tanggapan masyarakat Desa Pasa'bu terkait kinerja aparat desa dalam pengelolaan anggaran terhadap Pembangunan desa?
Informan (Rustam, A.Ma.Pd)	"Selaku Kepala dusun mengatakan melihat tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik dan nonfisik di desa tentunya sangat senang apalagi dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal ini akan membantu pemerintah desa melaksanakan perwujudan pembangunan di desa. Ya sebagai masyarakat juga kami sangat senang dengan tata Kelola aparat di desa kami yang mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang bagus di bidang pembangunan desa baik infrastruktur fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 1

Tabel 5.1

Pedoman Wawancara

Fokus dimensi	Pertanyaan	Nama Informan
Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif masyarakat Desa Pasa'bu)	1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Pasa'bu dalam menerapkan prinsip pengelolaan dana desa sesuai regulasi terhadap pembangunan desa?	Muh.Pipin.,S.T
	2. Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Pasa'bu terutama dalam pembangunan desa?	Muh.Pipin.,S.T
	3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pasa'bu sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya?	Hasrillah.,S.Ip
	4. Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?	Fahrisal.,S.Ip
	5. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat?	Fahrisal.,S.Ip
	6. Apa tanggapan masyarakat Desa Pasa'bu terkait kinerja aparat desa dalam pengelolaan anggaran terhadap Pembangunan desa?	Rustam.,A.Md & M.As'ad Tahir.,S.Ag

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 2

Pedoman observasi

Pengamatan atau observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Pasa'bu.

A. Tujuan

Untuk memperoleh suatu informasi atau data mengenai analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa pasa'bu kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (perspektif masyarakat desa Pasa'bu)

B. Aspek yang diamati

1. Lokasi penelitian
2. Analisis pengelolaan dana desa
3. Pembangunan & Perspektif masyarakat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 3

Permohonan Izin Penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Nomor : **2318/05/C.4-II/VII/42/2021** Makassar, 19/10/2021 M
Lamp. : -
H a l : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kantor Desa Pasa'bu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

N a m a	:	**Muh Hakim N**
Stambuk		105720564915
Jurusan	:	**MANAJEMEN**
Judul Penelitian	:	***Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu)***

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M.Si
NBM 651507

Tembusan :
1. *Rektor Unismuh Makassar*
2. *Ketua Jurusan*
3. *Mahasiswa Ybs.*
4. *Arsip*

Jl. Sultan Alauddin No.259 HP. 085230309264 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Menara Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 4

Persetujuan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN TAPALANG BARAT
DESA PASA'BU

Alamat : Jl. Trikora No. 5 Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang Barat

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 504/ 10 /XI/2021/DP

Kepala badan pemberdayaan mayarakat dan pemerintahan desa dengan ini memberikan rekomendasi, izin penelitian kepada :

Nama	: **MUIPHAKIM N**
Tempat, Tgl. Lahir	: Pasa'bu, 23 oktober 1997
NIM	: 105720564915
Jurusan	: Manajemen
Alamat	: Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat
Judul Penelitian	: Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasa'bu Kecamatan Tapalang barat Kabupaten Mamuju (Perspektif Masyarakat Desa Pasa'bu)

Izin ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Setelah tiba di lokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat dengan menunjukkan surat ini.
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat.
6. Izin ini berlaku selama 2 minggu setelah melaksanakan kegiatan penelitian ini agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Mamuju Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Demikian surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkuatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada instansi yang yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Pasa'bu, 25 November 2021

Mengetahui
an. Kepala Desa Pasa'bu

MUH.PIPIN. ST

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Camat Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju.
3. Kepala Desa Pasa,bu Kec. Tapalang Barat Di tempat.
4. Ketua Prodi Manajemen fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. **Yang bersangkutan.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 5
Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat

Mamuju 91512,Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR :00344/RP.PTSP.B/XI/2021

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).

2. Menimbang : Surat Dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 4879/05/c.4-VIII/XI/43/2021 Tanggal 1 November 2021 Tentang Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

a. Nama/Objek : MUH HAKIM N

b. NIM : 105720564915

c. Alamat : Pasa'bu Kel. Pasabu Kec. Tapalang Barat

c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data

ANALIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA PASA'BU KECAMATAN TAPALANG BARAT KABUPATEN MAMUJU (PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA PASA'BU)

2. Lokasi Penelitian : Desa Pasa'bu
3. Waktu/Lama Penelitian : 8 November 2021 s/d 2 Januari 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBIT

dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju

Pada Tanggal 24 November 2021

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196404081986031023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Desa Pasa'bu di Pasa'bu;
6. Pertinggal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 6

Surat Keterangan Bebas Plagiat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Hakim N
NIM : 105720564915
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2022 M
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Muh Hakim N 105720564915

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	5%
2	repository.unitomo.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Muh Hakim N 105720564915

ORIGINALITY REPORT

25%	28%	19%	25%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

4	eprints.stialanmakassar.ac.id Internet Source	2%

2%
★ eprints.stialanmakassar.ac.id
Internet Source

Exclude quotes
Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Muh Hakim N 105720564915

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	2%
2	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	2%
3	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	2%
4	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Muh Hakim N 105720564915

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	plesungan-bjn.desa.id Internet Source	6%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Muh Hakim N 105720564915

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 7
Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Muh.Pipin

Wawancara Bersama Bapak Hasrillah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara Bersama Bapak Rustam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS

Muh Hakim N, lahir di Pasa'bu pada tanggal 23 Oktober 1997,tepatnya di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Nurdin Yusuf dan Ibu Maria.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Tapalang Barat pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009,selanjutnya di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMPN 1 Tapalang Barat dan selesai pada tahun 2012, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMAN 1 Tapalang dan selesai pada tahun 2015, dan di tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Manajemen pada kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Program Studi Manajemen Universitas muhammadiyah Makassar .

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN